

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah), Yogyakarta, Penerbit Pustaka Baru Press.

Filmon M. Polin SH.,MH, Modul Hukum Perizinan.

Filmon M. Polin SH.,MH, 2014, Hukum Administrasi Negara, Departemen Multimedia, YPPH Batu, Jawa Timur.

Farida Patittingi. Hukum Kesehatan (Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan)

Irawan Soejito, 1983, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Kadarman, 2001, Pengantar Ilmu Manajemen, PT. Prehallindo, Jakarta,

M. Manullang, 1996, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta

Muchsan, 1992 Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta.

Paulus E. Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bhakti, Bandung

S. F. Marbun, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII press, Yogyakarta

Soejamto, 1996, Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman, Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Penerbit Alfa Beta CV.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Menetri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes/DK/X/2002/ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/8/VIII/1972 Tentang Pedagang Enceran Obat.

Peraturan Menetri Kesehatan RI Nomor 942/MenKes/Per/VI/2000 tentang Penggolongan Obat.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1331 tahun 2002, Tentang Pedagang Eceran Obat.

C. Website

Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan: <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017).

www.pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html